



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INNEKE QAMARIAH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN II
3. NHK : 821381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m2/31 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	430.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
2. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.216.741.989
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.432.559.981
F. HARTA LAINNYA	Rp.	400.000.000
Sub Total	Rp.	9.829.301.970



III. HUTANG

Rp. 208.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.621.301.970

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.